

Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Selama Refocusing Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Timur)

Riestri Indah Budi Sulistianingtyas¹ and Djoko Suhardjanto²

¹Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, miscorpius@gmail.com

²Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, djoko.suhardjanto@yahoo.com

Keywords:

Financial performance, Comparative analysis, Budget refocusing.

Abstract: *This study aims to determine differences in the financial performance of district/city local governments in East Java province before and during the implementation of the budget refocusing policy. The method used in this study uses a descriptive comparative quantitative method approach. The data used in this study are 38 District/City Regional Governments in East Java Province. The analytical method used the Paired-Sample t-test with the SPSS version 27 application. The results showed that the hypothesis in this study was supported.*

Kata Kunci:

Kinerja keuangan,
Analisis komparatif,
Refocusing anggaran.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode sebelum dan selama diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif komparatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 38 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis menggunakan Paired-Sample t-test dengan aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini didukung.

Article History:

Received: 27-03-2023

Online : 05-04-2023



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah menjadi sorotan publik sejak era reformasi. Era baru ini juga membawa perubahan terhadap manajemen modern dalam sektor publik yang fokus terhadap kinerja atau biasa disebut sebagai *performance-based management*. Manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi *new public management*. Era keterbukaan, informasi, teknologi, dan komunikasi membuat masyarakat semakin cerdas untuk menuntut transparansi pengelolaan uang publik. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam mengelola sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat pencapaian atas hasil kerja dalam bidang keuangan yang telah ditentukan melalui kebijakan ataupun ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan dapat digambarkan dengan melakukan analisis laporan keuangan (Mahmudi, 2019a) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Putri & Munandar, 2021). Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi (Mahmudi, 2019b).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat dilihat kecenderungan yang terjadi (Verawaty et al., 2020). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui APBD yang telah diterbitkan dan dilaksanakan (Putri & Munandar, 2021). Analisis rasio keuangan yang dapat diterapkan terhadap APBD antara lain rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian merupakan beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengatur keuangan di daerahnya masing-masing (Aulia & Rahmawaty, 2020). Rasio keuangan lain yang digunakan untuk melakukan analisis keuangan Pemerintah Daerah yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio belanja modal, dan rasio belanja operasi (Pandjaitan et al., 2018). Komponen APBD yang dapat dijadikan objek penilaian kinerja keuangan daerah yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Adnyani & Wiagustini, 2018).

Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan APBN Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 312,8 triliun atau 15,9% dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid-19 yaitu Tahun Anggaran 2019 (Kemenkeu, 2021). Penurunan pendapatan dan PAD, serta efisiensi biaya pada tahun 2020 disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19 sebagai tantangan bagi pemerintah sehingga memiliki dampak diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran dapat diartikan sebagai pemfokusan kembali anggaran yang telah disusun dalam APBD, lalu dialihkan sementara guna percepatan penanganan pandemi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk menerapkan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran. Implementasi *refocusing* dan realokasi anggaran menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, antara lain disebabkan oleh anggaran yang tidak memadai, regulasi yang bertubi-tubi, adanya traumatik dalam pengelolaan Bantuan Tak Terduga (BTT) dan belum pernah terjadi bencana seperti pandemi Covid-19 yang dampaknya berskala nasional (Basri & Gusnardi, 2021).

Pertumbuhan pendapatan, belanja dan PAD Pemerintah Daerah tahun 2019 hingga tahun 2020, Prestasi yang diraih sebelum munculnya kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 hingga kebijakan tersebut ditetapkan, serta sikap optimis Pemerintah Daerah mengenai target yang ingin dicapai mengenai pendapatan dan biaya daerah dengan masih berlangsungnya kebijakan *refocusing* anggaran merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam sebagai topik penelitian. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara spesifik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan serta menentukan strategi dalam perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian terkait kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. METODE

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan komparatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan rumusan hipotesa. Jenis data yang digunakan merupakan data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dengan data *cross section* (Hidayat et al., 2018).

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel pada penelitian ini adalah 35 LHP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan tahun 2020.

4. Analisis Data

Program statistik yang digunakan adalah SPSS versi 27. SPSS digunakan dalam analisis deskriptif dan analisis hipotesis dengan menggunakan *Paired Sample t-test*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut:

a. Uji Beda Sampel Berpasangan

Pada tahap ini dilakukan uji beda (*t-paired*) untuk data berdistribusi normal. Tabel 1 menunjukkan nilai rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, dan kinerja keuangan. Dasar pengambilan keputusan pada uji beda sampel berpasangan (*paired sample t-test*) adalah jika nilai signifikansi atau Sig. < 0,05 maka terdapat perbedaan pada kedua kelompok data, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikansi atau Sig. > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kedua kelompok data sehingga H0 diterima dan H1 ditolak (Ghozali, 2013).

Tabel 1. Paired Sample t-test

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	Df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	RKD_SBLM - RKD_SLMA	-0,01550	0,02544	0,00569	-0,02741	-0,00359	-2,725	19	0,013
Pair 2	RDD_SBLM - RDD_SLMA	-0,00500	0,01573	0,00352	-0,01236	0,00236	-1,422	19	0,171
Pair 3	REV_SBLM - REV_SLMA	-0,06850	0,10569	0,02363	-0,11797	-0,01903	-2,898	19	0,009
Pair 4	RBO_SBLM - RBO_SLMA	-0,02800	0,03750	0,00839	-0,04555	-0,01045	-3,339	19	0,003
Pair 5	RBM_SBLM - RBM_SLMA	0,06450	0,03120	0,00698	0,04990	0,07910	9,245	19	0,001
Pair 6	KK_SBLM - KK_SLMA	-0,00800	0,02308	0,00516	-0,01880	0,00280	-1,550	19	0,138

Keterangan: RKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; RDD = Rasio Derajat Desentralisasi, REV = Rasio Efektivitas; REF = Rasio Efisiensi; RBO = Rasio Belanja Operasi; RBM = Rasio Belanja Modal; KK = Kinerja Keuangan.

b. Uji Wilcoxon

Pada tahap ini dilakukan uji beda untuk data tidak berdistribusi normal. Tabel 2 menunjukkan nilai rasio efisiensi. Dasar pengambilan keputusan pada uji wilcoxon (*Wilcoxon Signed Rank Test*) adalah jika nilai signifikansi atau Sig. < 0,05 maka terdapat perbedaan pada kedua kelompok data, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikansi atau Sig. > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan kedua kelompok data sehingga H1 diterima dan H0 ditolak (Ghozali, 2013).

Tabel 2. Uji Wilcoxon Signed Ranked Test

Test Statistics ^a	
	REF_SLMA - REF_SBLM
Z	-2.769 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.006

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode sebelum dan selama diterapkannya kebijakan *refocusing* anggaran. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian rasio-rasio keuangan. Nilai signifikansi diperlukan untuk melihat apakah hipotesis pada penelitian ini diterima atau ditolak. Hasil pengujian *Paired Sample t-test* pada tabel 1 menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) kinerja keuangan sebesar 0,138, dapat dikatakan bahwa $0,138 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Kedua, tabel tersebut juga menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,013, dapat dikatakan bahwa $0,013 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat perbedaan kemandirian daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Ketiga, menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) rasio derajat desentralisasi sebesar 0,171, dapat dikatakan bahwa $0,171 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Keempat, menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) rasio efektivitas sebesar 0,009, dapat dikatakan bahwa $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat perbedaan efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Kelima, menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) rasio belanja operasi sebesar 0,003, dapat dikatakan bahwa $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat perbedaan belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Keenam, menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) rasio belanja modal sebesar 0,001, dapat dikatakan bahwa $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat perbedaan belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Hasil pengujian *Wilcoxon Signed Rank Test* pada tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,006, dapat dikatakan bahwa $0,006 > 0,005$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran.

Hasil pengujian hipotesis dengan Uji Wilcoxon pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) kinerja keuangan adalah sebesar 0,138, dapat dikatakan bahwa $0,138 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini didukung. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian (Deborah & Mangantar, 2020; Kusmila et al., 2018; Mengkuningtyas & Adib, 2015; Murni, 2020; Rieuwpassa et al., 2021; Zulkarnain et al., 2020).

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan sebelum dan selama *refocusing* anggaran. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis ditolak, dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian pada hipotesis H_1 dengan nilai signifikansi 0,138, dapat dikatakan bahwa $0,138 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur sebelum dan selama *refocusing* anggaran.

2. Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan dengan metode yang berbeda. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian selanjutnya juga dapat ditambahkan lamanya periode penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah atas kebesaran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Sebelas Maret serta seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

REFERENSI

- Adnyani, N. P. N. W., & Wiagustini, N. L. P. (2018). STUDI KOMPARATIF : KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SARBAGITA DENGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1111-1141. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p20>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584-598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33-48. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, M. J., Hadi, A. F., & Anggraeni, D. (2018). *Analisis Regresi Data Panel Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2006-2015*.
- Kemenkeu. (2021). Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020. In *Kementerian Keuangan*.

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 1146-1152

- Mahmudi. (2019a). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mahmudi, S. E. (2019b). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.).
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2011-2016. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20224>
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313. <https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss3.pp2296-2313>
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *MBIA*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>